



Edisi 1 2012

Dari Redaksi

Laporan Utama

MENUJU LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

*Pekanbaru kota bertuah
Rakyatnya ramah lagi bermarwah
Selayaknya buletin berubah
Dengan nuansa makin meriah*

Awal tahun senantiasa membawa suntikan semangat yang baru dan berbeda setiap tahunnya. Begitu pula yang terjadi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kesibukan awal tahun menyambut pelaksanaan pemeriksaan LKPD sudah tercium di antero kantor. Dari persiapan pembuatan P2 hingga membenahi segala KKP yang selama ini tidak tertata dengan rapi.

Untuk membekali pemeriksa yang akan berangkat melaksanakan pemeriksaan LKPD, tim redaksi mengusung tema Standar Akuntansi Pemerintah beserta perubahan-perubahannya. Tema ini akan diulas pada beberapa rubrik, yaitu Laporan Utama, Share dan Catatan Diklat.

Edisi pertama ini juga ditandai dengan perubahan format buletin yang tadinya hanya berjumlah 6 halaman menjadi 8 halaman. Diikuti hadirnya beberapa rubrik baru, yaitu rubrik Jelajah Riau yang akan mengulas tentang keunikan entitas-entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Redaksi juga menerima segala macam ide atau pemikiran dari semua teman-teman pegawai yang akan dituangkan dalam rubrik TulPas. Selain itu ada juga rubrik Info SubBag dan rubrik *Library Corner* yang diharapkan dapat membuat kita lebih mengenal seluk beluk perwakilan kita. Dan yang terakhir, ada rubrik Ngotaki Kata, sebuah game yang mencoba membangun interaksi antara Redaksi dan Pembaca.

Akhir kata selamat menjalani tahun ini dengan semangat baru!

-red-

Redaksi

Pujo Sumekto, Widia Woluningrum,
Niken Ari Astuti, Elaine, Dwi Ari
Susanty, Tridarwata, Angie Naditha,
Pipit Siti Jenar, Rusli Yahya, Afita
Alamat : Jl. Sudirman No. 721,
Pekanbaru, Riau

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah

dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi yang digunakan masih mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu basis kas menuju akrual. Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas, sedangkan Neraca dengan basis akrual. Standar akuntansi ini diterapkan karena pada saat itu basis kas digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual. Pada tahun 2010 terbitlah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggantikan PP 24/2005. Pada PP 71/2010 telah dituangkan SAP berbasis Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan SAP berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014 yang merupakan masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005.

Terbitnya PP 71/2010 merupakan acuan bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. (wie)





MASALAH TINDAK LANJUT YANG HARUS DITINDAKLANJUTI

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah salah satu agenda wajib semesteran bagi pemeriksa. Pemantauan TLHP merupakan salah satu komponen penyusunan laporan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran) BPK yang disampaikan kepada DPR. Data pemantauan TLHP juga menentukan kinerja masing-masing satker karena menjadi salah satu parameter yang dinilai pada IKU (Indikator Kinerja Utama). Biasanya, laporan pemantauan TLHP diminta oleh Ditama Revbang pada bulan Juli (untuk pemantauan semester I) dan Januari (untuk pemantauan semester II).

Selama ini rutinitas kegiatan pemantauan TLHP sering meninggalkan jejak-jejak masalah bagi Perwakilan Riau. Ada dua masalah utama dalam penyelesaian laporan pemantauan TLHP, yakni:

1. Laporan terlambat disampaikan ke Ditama Revbang

Masalah ini kelihatan sederhana namun dari waktu ke waktu hampir selalu terjadi tanpa ada penyelesaian. Beban kerja yang tinggi adalah sumber utama timbulnya masalah ini. Pada periode Juli dan Januari banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemeriksa, di antaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta kelengkapannya (yakni KKP, IHPS dan MAKIN), Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah, DUPAK, dan dokumen-dokumen lain permintaan pusat yang sifatnya insidental.

2. Angka-angka yang disajikan pada laporan tidak akurat

Masalah ini juga terus berulang dari tahun ke tahun. Karena itu file laporan pemantauan TLHP untuk satu entitas dan satu periode pemantauan bisa berduplikasi sendiri dan menemukan "title" yang beragam untuk dirinya, antara lain "net", "net banget", "super duper net", dan masih banyak varian lainnya. Sama seperti masalah keterlambatan laporan, ketidakakuratan angka juga disebabkan karena beban kerja yang tinggi. Banyaknya pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan kejaran tenggat pekerjaan melakukan cek dan ricek terhadap akurasi angka.

Beban kerja menjadi masalah utama yang kita hadapi untuk menyelesaikan laporan pemantauan TLHP dengan akurat dan tepat waktu. Sayangnya beban kerja tidak dapat dikurangi karena itulah tuntutan atas kenaikan tunjangan BPK. Masalah SDM yang kurang tidak akan kita bahas karena mengatasi masalah tersebut di luar kemampuan perwakilan. Jadi apa yang bisa kita lakukan?

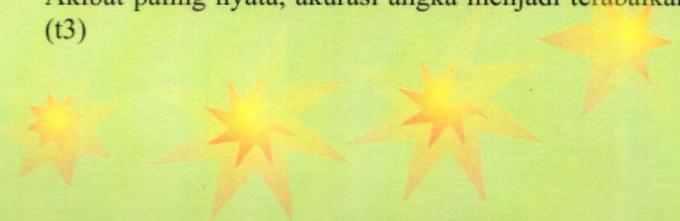
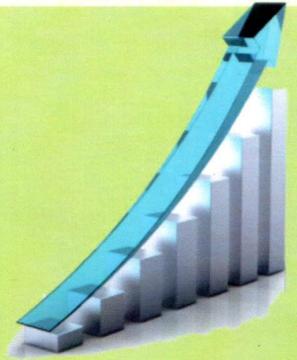
1. Sebelum semua laporan menumpuk sebaiknya kita

menyelesaikan dengan tuntas apa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Contohnya KKP. KKP Indeks A dan Indeks B dapat diselesaikan di lapangan sehingga saat kembali ke kantor kita tinggal mengerjakan Indeks C. Teorinya sederhana, namun jarang diimplementasikan karena berbagai kesulitan. Solusi ini sangat layak untuk dicoba dan jika berhasil akan sangat membantu penyelesaian laporan-laporan lain. Pengerjaan DUPAK juga dapat dilakukan secara mencicil. Metode ini selain menjamin penyelesaian DUPAK lebih cepat juga mencegah kita lupa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama satu semester.

2. Jika semua pekerjaan menanti di satu waktu, maka menetapkan daftar prioritas mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. Di antara banyaknya pekerjaan yang menunggu, mana yang bisa ditunda terlebih dahulu? Laporan apa yang bisa diselesaikan agak terlambat sedikit (sedikit saja, tidak banyak)? Sebagai contoh, jika ada beberapa pekerjaan yang menunggu yakni LHP, bahan IHPS, KKP, MAKIN, Laporan Pemantauan TLHP, Laporan Pemantauan Kerugian Daerah

dan DUPAK, maka prioritasnya bisa ditetapkan sebagai berikut: Salah satu kriteria penetapan prioritas adalah apakah laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak eksternal ataukah hanya digunakan untuk keperluan internal BPK. Dalam kondisi normal, hendaknya kita menetapkan prioritas laporan eksternal di atas laporan internal.

3. Selain kedua alternatif solusi di atas, yang lebih penting adalah peran seorang "komandan" dalam menginstruksikan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan apa pada suatu waktu tertentu. Setelah satu pekerjaan benar-benar selesai (termasuk cek dan ricek), barulah beranjak ke pekerjaan berikutnya. Penjadwalan perlu dilakukan karena membebaskan banyak pekerjaan pada satu waktu membuat pegawai kehilangan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Akibat paling nyata, akurasi angka menjadi terabaikan. (t3)



Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah salah satu agenda wajib semesteran bagi pemeriksa. Pemantauan TLHP merupakan salah satu komponen penyusun laporan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran) BPK yang disampaikan kepada DPR. Data pemantauan TLHP juga menentukan kinerja masing-masing satker karena menjadi salah satu parameter yang dinilai pada IKU (Indikator Kinerja Utama). Biasanya, laporan pemantauan TLHP diminta oleh Ditama Revbang pada bulan Juli (untuk pemantauan semester I) dan Januari (untuk pemantauan semester II).

Selama ini rutinitas kegiatan pemantauan TLHP sering meninggalkan jejak-jejak masalah bagi Perwakilan Riau. Ada dua masalah utama dalam penyelesaian laporan pemantauan TLHP, yakni:

1. Laporan terlambat disampaikan ke Ditama Revbang

Masalah ini kelihatan sederhana namun dari waktu ke waktu hampir selalu terjadi tanpa ada penyelesaian. Beban kerja yang tinggi adalah sumber utama timbulnya masalah ini. Pada periode Juli dan Januari banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemeriksa, di antaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta kelengkapannya (yakni KKP, IHPS dan MAKIN), Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah, DUPAK, dan dokumen-dokumen lain permintaan pusat yang sifatnya insidental.

2. Angka-angka yang disajikan pada laporan tidak akurat

Masalah ini juga terus berulang dari tahun ke tahun. Karena itu file laporan pemantauan TLHP untuk satu entitas dan satu periode pemantauan bisa berduplikasi sendiri dan menemukan "title" yang beragam untuk dirinya, antara lain "net", "net banget", "super duper net", dan masih banyak varian lainnya. Sama seperti masalah keterlambatan laporan, ketidakakuratan angka juga disebabkan karena beban kerja yang tinggi. Banyaknya pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan kejaran tenggat pekerjaan melakukan cek dan ricek terhadap akurasi angka.

Beban kerja menjadi masalah utama yang kita hadapi untuk menyelesaikan laporan pemantauan TLHP dengan akurat dan tepat waktu. Sayangnya beban kerja tidak dapat dikurangi karena itulah tuntutan atas kenaikan tunjangan BPK. Masalah SDM yang kurang tidak akan kita bahas karena mengatasi masalah tersebut di luar kemampuan perwakilan. Jadi apa yang bisa kita lakukan?

1. Sebelum semua laporan menumpuk sebaiknya kita

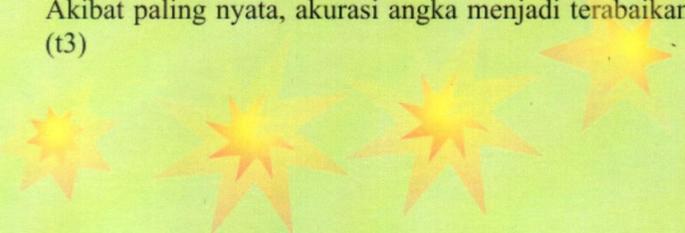
menyelesaikan dengan tuntas apa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Contohnya KKP. KKP Indeks A dan Indeks B dapat diselesaikan di lapangan sehingga saat kembali ke kantor kita tinggal mengerjakan Indeks C. Teorinya sederhana, namun jarang diimplementasikan karena berbagai kesulitan. Solusi ini sangat layak untuk dicoba dan jika berhasil akan sangat membantu penyelesaian laporan-laporan lain. Pengerjaan DUPAK juga dapat dilakukan secara mencicil. Metode ini selain menjamin penyelesaian DUPAK lebih cepat juga mencegah kita lupa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama satu semester.



2. Jika semua pekerjaan menanti di satu waktu, maka menetapkan daftar prioritas mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. Di antara banyaknya pekerjaan yang menunggu, mana yang bisa ditunda terlebih dahulu? Laporan apa yang bisa diselesaikan agak terlambat sedikit (sedikit saja, tidak banyak)? Sebagai contoh, jika ada beberapa pekerjaan yang menunggu yakni LHP, bahan IHPS, KKP, MAKIN, Laporan Pemantauan TLHP, Laporan Pemantauan Kerugian Daerah

dan DUPAK, maka prioritasnya bisa ditetapkan sebagai berikut: Salah satu kriteria penetapan prioritas adalah apakah laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak eksternal ataukah hanya digunakan untuk keperluan internal BPK. Dalam kondisi normal, hendaknya kita menetapkan prioritas laporan eksternal di atas laporan internal.

3. Selain kedua alternatif solusi di atas, yang lebih penting adalah peran seorang "komandan" dalam menginstruksikan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan apa pada suatu waktu tertentu. Setelah satu pekerjaan benar-benar selesai (termasuk cek dan ricek), barulah beranjak ke pekerjaan berikutnya. Penjadwalan perlu dilakukan karena membebaskan banyak pekerjaan pada satu waktu membuat pegawai kehilangan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Akibat paling nyata, akurasi angka menjadi terabaikan. (t3)



You can't not communicate. Everything you say and do or don't say and don't do sends a message to others.

-- Unknown --



Komunikasi antarpersona (interpersonal communication) adalah nyawa dari tiap lingkungan pekerjaan. Tanpa komunikasi yang baik pekerjaan dapat tidak selesai, tidak sempurna, dan pada akhirnya tujuan organisasi tidak tercapai. Sebaliknya, bila berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan pekerjaan akan berjalan produktif. Komunikasi antar persona disini memiliki peranan penting dalam memantapkan kepercayaan (trust) dan semangat positif individu-individu. sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif agar berkontribusi pada produktivitas kerja.

Komunikasi antarpersona dimaknai sebagai interaksi verbal maupun non-verbal antara dua atau lebih individu/persona yang saling interdependen di dalam suatu lingkungan tertentu. Sebuah komunikasi dikatakan efektif jika tercipta kesepahaman makna antara komunikator (pemberi pesan) dan komunikan (penerima pesan) atas suatu pesan. Komunikasi efektif tidak harus dalam porsi yang seimbang, lama dan formal. Dalam sebuah interaksi sederhana dan singkat pun dapat terjadi komunikasi efektif selama terdapat kesepahaman yang sama.

Menurut *American Management Association*, terdapat empat lingkungan pekerjaan yang dapat menyuburkan komunikasi yang buruk dan tidak efektif, yakni:

1. *Dyads* (dua orang), Pimpinan dan bawahan, atau dua pegawai yang berbagi ruangan memiliki lebih banyak kesempatan mengalami kegagalan berkomunikasi sebagai akibat dari kedekatan fisik dan organisasional serta ketergantungan yang tinggi.

2. *Teams*. Perbedaan sudut pandang tentang tujuan tim

diantara anggotanya sebagai akibat keragaman latar belakang pengalaman dan keahlian memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan kegagalan berkomunikasi dan konflik antarpersona.

3. *Departments/ Bagian*, kerap mengalami kegagalan berkomunikasi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Semakin banyak bagian yang dimiliki, maka akan semakin banyak interpretasi yang mungkin muncul, terutama apabila menyangkut prosedur baru.

4. *The Whole Organization*, Pada level ini, gunjingan/gossip menjadi perusak utama karena cenderung cepat meluas dan sulit dihentikan. Gunjingan adalah hasil dari buruknya komunikasi antarpersona atau adanya favoritisme atas sebuah bagian. Hal ini akan memperburuk komunikasi antarbagian dan bahkan mengarah pada persaingan tidak sehat di dalam lingkungan pekerjaan.

Untuk mengatasi hambatan berkomunikasi tersebut, maka keahlian melakukan komunikasi antarpersona sangatlah penting dimiliki oleh setiap individu. *Basic Interpersonal Communication Skills* yang harus dimiliki diantaranya: (1) *Listen First*; (2) Menghargai Perbedaan Sudut Pandang; (3) Bersikap Asertif; (4) Belajar dari Interaksi; (5) Memberikan sinyal positif; dan (6) senyuman serta *eye contact*.

Dalam sebuah sistem komunikasi antarpersona di suatu lingkungan pekerjaan, segala sesuatunya berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan *constant maintenance* dari setiap anggotanya, dengan terus belajar mengasah kemampuan berkomunikasi untuk menjaga kepercayaan yang telah terbangun.

*disarikan dari berbagai sumber

Resume Kliping

Haluan Riau, Rabu 11 Januari 2012 (Sejak Juni 2011 Tak Ada Perkembangan) Temuan BPK Diabaikan 15 SKPD

Sekretaris Inspektorat Wilayah Riau Dahlius mengatakan, sekitar 20 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Riau terhadap 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dalam proses penyelesaian. Padahal temuan tersebut disampaikan sejak Juni 2011. Hal ini mengindikasikan SKPD mengabaikan temuan itu, karena sejauh ini belum ada penerapan sanksi. Menurut Dahlius, proses penyelesaian terus berjalan dan pada posisi Juni 2011 sudah 54% diselesaikan dari nilai temuan Rp11 miliar.

Riau Pos, Sabtu 18 Februari 2012 BPK RI Turun Tinjau Pelaksanaan Dana BOS

Tim BPK RI yang di pimpin oleh Dr H Rizal Djalil melakukan peninjauan ke empat sekolah dari dua kabupaten di Riau. Dari hasil peninjauan, dana BOS tahun 2012, empat sekolah tersebut sudah menerima kucuran anggaran dana BOS langsung dari Pemerintah Pusat, sebanyak tiga bulan. Untuk Provinsi Riau, untuk 2012 total anggaran yang diperuntukan untuk dana BOS sebesar Rp433 milyar. Sementara di tahun 2012 ini anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Riau meningkat menjadi sebesar Rp642 milyar. Untuk 2012, triwulan pertama Januari-Maret

sudah diterima masing-masing sekolah. Hanya saja, ada beberapa sekolah yang sampai kini belum menyelesaikan rencana kegiatan sekolah (RKS).

Riau Pos, Selasa 13 Maret 2012 Hampir Seluruh SKPD Mendapat Catatan BPK

Kepala Inspektorat Dumai Dwi Orisiawan mengatakan, hampir seluruh SKPD di Kota Dumai mendapatkan catatan kecil dari BPK, bila catatan ini tidak ditindaklanjuti SKPD, maka hal itu berujung akan menjadi temuan BPK. Pada umumnya yang banyak menjadi catatan BPK kepada SKPD adalah masalah pelayanan umum.

Berkunjung ke Bumi Melayu Lancang Kuning, rasanya sayang sekali jika belum mengunjungi Bagansiapiapi, ibukota Rokan Hilir. Kota ini terletak di ujung utara Riau, berjarak sekitar 350 km dari Pekanbaru.

Menurut sejarah, nama Bagansiapiapi berasal dari kata siapiapi (kunang-kunang). Dikisahkan terjadi konflik antara

suku Tionghoa dan penduduk Thailand di daratan Tiongkok Selatan yang menyebabkan orang-orang Tionghoa melarikan diri. Dengan mengendarai tiga perahu kayu (tongkang), mereka mengarungi lautan hingga cahaya kunang-kunang yang bertebaran di hutan bakau di tepi pantai membuat mereka mendarat di daerah tak bertuan, yang kemudian mereka namai Bagansiapiapi.

KOTA PENGHASILIKAN

Kota ini sangat termasyur sebagai kota penghasil ikan. Surat kabar De Indische Mercurius menulis bahwa pada tahun 1928, Bagansiapiapi adalah kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norwegia. Namun dalam perkembangannya, produksi ikan semakin berkurang karena pesisir sekitar Bagansiapiapi mengalami pendangkalan oleh endapan lumpur yang dibawa air Sungai Rokan.

KOTA BERISIK YANG UNIK

Berisik. Kesan itulah yang timbul dari Bagansiapiapi. Hingar bingar suara burung walet (asli dan KW – dari kaset) menyambut kedatangan Anda. Kehadiran kereta malam yang mengangkut warga keliling kota membuat suasana lebih meriah. Belum lagi jika Anda berkunjung di saat Imlek. Suara petasan tak sudi mengalah pada nyanyian walet. Sungguh kota berisik nan unik!

KOTA PECINAN NAN MENAWAN

Selain etnis Melayu, penduduk Bagansiapiapi sebagian besar merupakan etnis Tionghoa. Perayaan warga etnis Tionghoa pun menjadi pesona wisata budaya Bagansiapiapi.

Imlek dan Cap Go Meh

Perayaan Imlek berlangsung selama 15 hari sampai Cap Go

Meh. Selama perayaan Imlek, Bagansiapiapi bermetamorfosis menjadi "Kota Cahaya". Lampion dengan aneka bentuk dan ukuran ini menghiasi rumah-rumah penduduk, perkantoran, kelenteng dan vihara.

Bagansiapiapi makin memikat saat Cap Go Meh. Kaum remaja memanfaatkan perayaan ini untuk mencari pasangan hidupnya. Pada malam hari ratusan lampion diterbangkan ke angkasa di depan kelenteng tertua di Kota Bagansiapiapi, Ing Hok Kiong. Acara kemudian dilanjutkan dengan pawai yang diikuti oleh berbagai suku, marga, yayasan dan perguruan. Sekali lagi, kemeriahan takkan lengkap tanpa kehadiran petasan yang menerangi langit dan mengalunkan nada keriang. Sungguh meriah....!! Menyaksikan parade Cap Go Meh adalah sebuah pengalaman yang luar biasa.

Bakar Tongkang (Cap Go Lak)

Ritual ini erat kaitannya dengan sejarah kedatangan orang Tionghoa di Bagansiapiapi. Bagi masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi, Bakar Tongkang diadakan untuk mengenang para leluhur mereka dalam menemukan Bagansiapiapi dan sebagai wujud syukur kepada Dewa Kie Ong Ya.



Pada sore hari, replika tongkang seberat kurang lebih 400 kg digotong oleh puluhan utusan dari seluruh kelenteng di Bagansiapiapi. Arak-arakan dimulai dari kelenteng Ing Hok Kiong sampai ke tempat pembakaran yang berjarak sekitar 2 km dari Ing Hok Kiong.

Esensi yang unik dari ritual ini adalah arah jatuhnya tiang layar utama tongkang saat dibakar. Jika tiang layar utama jatuh ke arah laut maka warga meyakini bahwa peruntungan usaha dalam mata pencaharian akan lebih banyak datang dari hasil laut. Sebaliknya jika tiang layar utama jatuh ke arah darat maka kekuatan mukjizat peruntungan usaha dan mata pencaharian akan lebih banyak datang dari hasil darat. (t3)

Renungan

6 Pertanyaan Imam Al Ghazali

Suatu hari, Imam Al Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, Pertama, "Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?". Ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Beliau mengatakan semua jawaban benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah "MATI". Sebab itu sudah janji Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati.

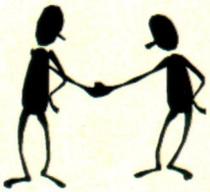
Lalu beliau meneruskan pertanyaan yang kedua. "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Ada yang menjawab negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Benar, tapi yang paling benar adalah "MASA LALU". Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, kita tetap tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.

Pertanyaan yang ketiga. "Apa yang paling besar di dunia ini?". Ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar kata beliau, tapi yang paling benar adalah "NAFSU" (Al A'Raf 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka.

Pertanyaan keempat adalah, "Apa yang paling berat di dunia ini?". Ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Semua jawaban benar, kata beliau, tapi yang paling berat adalah "MEMEGANG AMANAH" (Al Ahzab 72). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah swt meminta mereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah SWT, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena tidak bisa memegang amanahnya.

Pertanyaan yang kelima, "Apa yang paling ringan di dunia ini?". Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, tapi yang paling ringan adalah "MENINGGALKAN SHALAT". Gara-gara pekerjaan dan meeting sering kita tinggalkan sholat.

Lantas pertanyaan ke enam adalah, "Apakah yang paling tajam di dunia ini?". Murid-muridnya menjawab serentak, pedang! Benar, tapi yang paling tajam adalah "LIDAH MANUSIA". Karena melalui lidah, Manusia dengan gampang menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. (dari berbagai sumber)



Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Basis Kas Menuju Akruwal dihapus dan Basis Akruwal harus sudah diterapkan pada tahun 2014. Untuk pemerintah pusat/daerah yang sampai saat ini masih menggunakan PP 24/2005, penyusunan laporan keuangan mengacu pada Lampiran II PP 71/2010. Dengan demikian pemeriksa tidak lagi menggunakan PP 24/2005 sebagai kriteria dalam penulisan temuan pemeriksaan, tetapi menggunakan Lampiran II PP 71/2010.

SAP berbasis kas menuju akruwal dengan SAP berbasis akruwal sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akruwal dalam SAP berbasis kas menuju akruwal sudah banyak dicantumkan dalam laporan keuangan terutama Neraca. Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh basis akruwal.

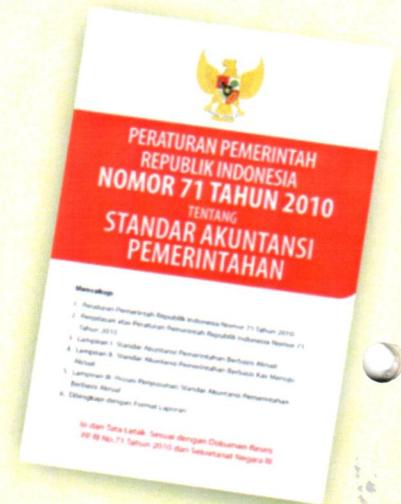
SAP Berbasis Akruwal secara umum memiliki 3 perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan pendahulunya, SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. Perbedaan tersebut terletak pada tersajinya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi perihal kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkurangnya Saldo Anggaran Lebih suatu tahun anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya memperlihatkan indikasi pemanfaatan anggaran yang lebih baik. Dengan adanya laporan ini, informasi yang didapatkan pemangku kepentingan akan semakin luas.

Laporan Operasional pada dasarnya merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos pendapatan berdasarkan jenis kegiatannya, baik operasional atau non-operasional. Pemerintah pusat/daerah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melalui laporan ini akan diperoleh informasi besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk dana lancar, dana cadangan, ataupun yang diinvestasikan pada aktiva tetap.

Pertanyaan dan pro-kontra soal siap atau tidak siapkah pemerintah pusat/daerah mengimplementasikan SAP Berbasis Akruwal ini terus timbul di berbagai kalangan. Hal yang paling banyak muncul di benak masyarakat adalah masalah sumber daya manusia.



Library Corner

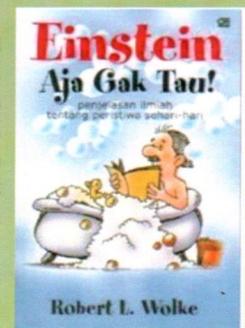


* Selamat Kepada **Fahriyani** karena telah terpilih dalam *Library Corner* edisi ini, Anda mendapatkan Souvenir dari redaksi. Souvenir dapat diambil di Subbag. Hukum dan Humas

Resensi Buku :

Didalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sepele tapi membingungkan. Seperti misalnya bisakah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah peluru senapan angin dijatuhkan dari gedung paling tinggi di dunia, apakah masih tetap berbahaya? atau coba Anda pikirkan beban yang diterima truk trailer, jika truk trailer tersebut mengangkut ribuan burung merpati tetapi burung-burung itu selalu beterbangan didalam trailer?

Bagi Anda yang kurang puas hanya dengan penjelasan ilmiah secara tertulis, mungkin Anda bisa mencoba untuk mempraktekkan teori-teori yang dijelaskan karena didalam buku ini Anda juga akan diajak melakukan banyak percobaan-percobaan yang mudah dilakukan tapi sangat menyenangkan untuk dicoba.



Penjelasan-penjelasan yang ada didalam buku ini bertujuan memberikan jawaban dan gambaran yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Jadi masihkah Anda akan terus terpaku dalam ketidaktahuan karena-Einstein Aja Gak Tau!

Memetik Buah Penantian Panjang

Pepatah berakit – rakit kehulu, berenang – renang ke tepian agaknya tepat menggambarkan perjalanan hidup sosok kita kali ini. Heriadi, atau akrab dipanggil pak Heri adalah pegawai yang baru mengabdikan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau selama 2 tahun. Namun bapak tiga anak ini tak sepenuhnya pegawai baru, karena sebelumnya telah mengabdikan di BPK selama kurang lebih 21 tahun!.



BAPAK HERIADI

Heri mulai mengabdikan di BPK Sumatera Utara mulai tahun 1991 sebagai petugas kebersihan, “Saya masuk BPK tanggal 25 November 1991, beberapa bulan setelah saya lulus SMK” ujar Heri mengenang saat pertama masuk BPK. Heri menjalani pekerjaannya selama kurang lebih 14 tahun, dengan gaji awal sebesar Rp41 ribu per bulan. “Waktu itu

penggajian masih melalui koperasi Perwakilan, baru sekitar tahun '93 kami ikut CV (outsourcing-red)” kenangnya.

Selama menjalani pekerjaannya, Heri terkenal sebagai pribadi yang rajin dan tekun. Sekitar tahun 2005, Heri dan beberapa rekannya pun ditawarkan menjadi pegawai honorer. “Saat itu jamannya Bapak almarhum Sanusi (Kalan-red)”. Pada tahun itu juga, saat ada tes menjadi pegawai BPK, Heri mencoba peruntungan untuk ikut. Namun sayang, saat itu dia belum berhasil lolos. Tahun 2009, Heri ikut tes masuk BPK lagi. “Alhamdulillah lolos, dan langsung ditempatkan di Riau” ujarnya sumringah.

Saat ini Heri ditempatkan di Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan bertanggungjawab atas peralatan, ruangan dan ATK kantor. Heri mengakui bahwa apa yang diterimanya saat ini adalah berkah, untuk itu dia akan bekerja sebaik – baiknya. Diapun mengajak rekan – rekan yang lain untuk berusaha menjadi PNS BPK, “Rajinlah bekerja dan patuhi peraturan BPK” pesannya sebelum menutup pembicaraan. (leyn)

Info Subbag

CEK ABSENSIMU HITUNG REMUNNYA

Oleh: Subbagian SDM

Ketika mengecek gaji yang masuk tiap bulan terkadang kita menemukan potongan pada Tunjangan Kegiatan Pembinaan Khusus BPK (TKPK BPK). Kita pun bertanya-tanya ada apa dengan absensi dua bulan sebelumnya?. Ya, benar. **kapitulasi kehadiran** berpengaruh pada TKPK BPK - istilah populernya remun - yang kita terima.



SDM adalah Rekap Daftar Hadir Pegawai (RDHP) yang dikirimkan setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. Petugas Inputter Absen (PIA) menyusun RDHP berdasarkan dokumen pendukung ketidakhadiran yang diserahkan oleh pegawai.

Seringkali yang menjadi kendala bagi PIA adalah rendahnya kesadaran pegawai untuk menyerahkan dokumen pendukung ketidakhadirannya. Padahal dokumen pendukung tersebut merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan bagi pegawai guna menjaga hak-haknya. Dokumen pendukung ketidakhadiran wajib disampaikan kepada atasan, selanjutnya diserahkan kepada PIA selambat-lambatnya pada kesempatan pertama kali masuk/ hadir setelah ketidakhadirannya.

Adapun jenis ketidakhadiran yang harus dilengkapi dokumen pendukungnya adalah izin keluar kantor sehingga absen masuk/ pulang kerja harus menyertakan formulir Izin Atasan (IA); Tidak masuk kerja tanpa alasan kedinasan dengan izin atasan harus menyertakan surat izin dari atasan (I); Tidak masuk kerja karena

sedang melaksanakan cuti harus menyertakan Surat Cuti dari Kepala Perwakilan sebelum melaksanakan cuti (CT); Ijin Sakit harus menyertakan sertifikat/surat keterangan dari dokter (ST); Tidak masuk kerja dengan alasan kedinasan harus menyertakan Surat Tugas, Instruksi Dinas, atau Undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon III (L atau TL); Setiap pegawai dapat memantau hasil perekaman jari melalui situs <http://pip.bpk.go.id> dengan terlebih dahulu mensinkronkan melalui situs <http://program6s.bpk.go.id/absen>.

Kepada seluruh pegawai diharapkan agar lebih aktif melaporkan ketidakhadirannya dengan menyerahkan dokumen pendukung kepada PIA supaya “remun” yang diterima tidak ada potongan lagi, bagaimana rekan – rekan? @rt



Pemotongan TKPK BPK bervariasi, yaitu terlambat datang atau pulang cepat dan Cuti Alasan Penting (CAP) selain alasan musibah (1%); Tidak masuk kerja tanpa alasan kedinasan (3%); pemalsuan dokumen pendukung ketidakhadiran (10%); Tugas Belajar atas biaya di luar BPK atau instansi pemerintah lebih dari enam (enam) bulan dipotong sebesar 20% sejak bulan ke-7 (ketujuh); serta pemotongan TKPK BPK terkait hukuman disiplin yang besarnya beragam tergantung jenis hukuman disiplinnya.

Dasar pemotongan TKPK BPK oleh Sub Bagian Remunerasi Biro

Family Gathering Dalam rangka memeriahkan HUT BPK RI ke-65, yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menggelar

acara family gathering. Acara diselenggarakan pada hari Minggu (8/12) di Taman Alam Mayang Pekanbaru dan diikuti hampir seluruh pegawai beserta keluarga. Acara dibuka dengan sambutan Kalan dan pemotongan tumpeng. Kemudian dilanjutkan dengan aneka lomba yang melibatkan seluruh pegawai beserta keluarga.



Sabtu, 14 Januari 2012 : Seminar kesehatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan Tema "Problema Seks, Perselingkuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga" dengan pembicara dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG, MARS dan dr. Phyu Phyu Palae.

707 Aki Kata

Cari kata tersembunyi dalam kotak di bawah ini :

D	F	N	T	Y	A	C	B	K	S
A	S	E	T	T	E	T	A	P	I
K	P	R	B	N	L	K	P	D	S
R	W	A	I	M	U	Q	F	A	K
U	K	C	N	W	M	S	B	N	A
A	H	A	T	O	P	I	N	I	E
L	U	R	E	N	S	T	R	A	N
P	A	V	G	H	U	I	A	M	T
L	S	A	R	A	M	C	L	Z	I
D	E	B	I	T	B	A	N	P	T
E	R	Q	T	F	A	X	K	V	A
I	S	J	A	U	R	Z	N	I	S
G	I	K	S	A	U	D	I	T	N

Aturan Main :
Carilah 15 kata yang terkait dengan dunia ke BPK an atau pemeriksaan. Lingkari atau beri garis kata yang merupakan jawabannya. Posisi kata dapat mendatar, menurun, atau diagonal. Kirim Jawaban pada Sub Bagian Hukum dan Humas paling lambat 1 Juni 2012. Lima jawaban yang benar akan diundi dan mendapatkan souvenir menarik. Nama-nama pemenang akan diumumkan di buletin edisi mendatang.

Selamat mengutak-atik kata!

9 s.d. 16 Januari 2012 : Rekonsiliasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011 bersama dengan Pemerintah Daerah se-Riau.

Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Riau ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Rabu, 1 Februari 2012, Komisi A DPRD Provinsi Riau, mengunjungi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Rombongan diterima oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, beserta beberapa pejabat lain di ruang rapat kantor perwakilan.



Rabu, 18 Januari 2012 : Penyerahan LHP Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2010 dan 2011

Rabu, 25 Januari 2012: Penyerahan LHP Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2010 dan 2011

Senin 30 Januari 2012 : Penyerahan LHP atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Tahun Buku 2010 dan Tahun 2011 (Semester I) serta LHP atas Operasional PT Sarana Pembangunan Riau Tahun Buku 2010 dan 2011 (Semester I)

Rabu, 1 Februari 2012 : Penyerahan LHP atas Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya TA 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kota Pekanbaru

Kamis, 2 Februari 2012 : Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Anggota VI BPK RI Sidak Dana BOS ke beberapa Sekolah. Jumat (17/2), Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil bersama

pejabat yang lain melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke SMPN 21 Kecamatan Marpoyan Damai dan SDN 016 Kecamatan Tampan di Pekanbaru, serta SMPN 4 Kecamatan Tambang dan SDN 024 Kecamatan Tambang. di Kabupaten Kampar. Selain ke beberapa sekolah, sidak juga dilakukan di Universitas Riau untuk melihat lahan yang masih dalam sengketa.



Senin, 19 Maret 2012 : Pengarahan Pimpinan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau